

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah elemen vital dalam kehidupan manusia. Bagi sebuah negara, pendidikan menjadi kunci kemajuan dan perkembangan (Hidayatsyah Noor et al., 2023). Pendidikan merupakan proses yang dirancang secara sadar dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik dalam aspek material maupun spiritual, untuk kepentingan pribadi, komunitas, serta kehidupan duniawi dan akhirat (Jamaluddin, 2022). Di dalam pendidikan, kurikulum menjadi komponen utama yang menentukan keberhasilan sistem pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas pendidikan, kurikulum harus terus disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan para peserta didik.

Sistem kurikulum di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tantangan sosial dan politik yang dihadapi negara. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan. Dari tahun 1947 hingga akhir 2022, kurikulum nasional telah diubah berkali-kali. Pembaruan ini terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan kini dengan Kurikulum Merdeka (Tarmizi Hasibuan et al., 2023). Perubahan-perubahan ini didasarkan pada tiga pilar utama: perencanaan kurikulum, orientasi tujuan, dan kompetensi (Herman et al., 2023).

Sejarah perubahan dan perkembangan kurikulum di Indonesia dapat dirinci dari masa ke masa. *Yang pertama*, pada masa orde lama terjadi 3 kali perubahan yaitu kurikulum 1947, 1952 dan 1964. Kurikulum 1947 dalam prakteknya baru dilaksanakan pada tahun 1950 dan dikenal dengan kurikulum rencana pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 1952 lebih mengarah pada sistem pendidikan nasional dan lebih rinci dari kurikulum 1947 dilihat dari mata pelajaran serta silabusnya. Diakhir masa kurikulum 1952, terbitlah program pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Penekanannya ada pada pengembangan kreativitas, rasa, karsa, karya dan etika (Pancawardhana). *Yang kedua*, pada masa orde baru terjadi beberapa kali perubahan yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1968 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1964. Kurikulum ini menjadi model

kurikulum terintegrasi. Pada Kurikulum 1975, orientasi pendidikan menuju pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Dilanjutkan menjadi kurikulum 1984 sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini, penekanan diberikan pada peran aktif siswa melalui penerapan model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Kurikulum 1994 adalah hasil dari upaya untuk mengintegrasikan kurikulum-kurikulum sebelumnya, khususnya kurikulum 1975 dan 1984. *Yang ketiga*, pada masa reformasi mengalami beberapa perubahan yaitu kurikulum 2004, 2006, 2013 sampai saat ini Kurikulum Merdeka. Kurikulum 2004 dikenal dengan istilah *competence-based curriculum* (CBC) yang menekankan pada pengembangan masing-masing keterampilan. Dilanjut dengan kurikulum 2006 yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berakhir kurikulum KTSP maka pemerintah mengganti menjadi kurikulum 2013 (K-13) yang secara resmi diterapkan pada tahun 2013. Dalam K-13 ini terjadi pula perubahan dan perkembangan dari tahun ke tahunnya sampai dengan saat ini tahun 2024. Selesainya masa kurikulum 2013, maka saat ini pendidikan Indonesia tengah menerapkan sebuah konsep kurikulum terbaru yang dinamakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini mengubah jenis pembelajaran dari di dalam kelas mejadi di luar kelas (Fithriyyah, 2023). Proses pergantian dari K-13 ke Kurikulum Merdeka banyak mengalami perubahan guna perbaikan yaitu terdiri dari diberlakukannya kurikulum darurat karena hampir seluruh dunia terjangkit wabah covid pada tahun 2019 yang menyebabkan tertinggalnya pendidikan di Indonesia (*learning loss*). Kemudian dari kurikulum darurat diberlakukannya kurikulum prototipe pada tahun 2022 hingga saat ini Kurikulum Merdeka merupakan wujud hasil merubah dan menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya.

Kurikulum Merdeka merupakan program yang menjadi wujud upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis pembelajaran pasca pandemi. Pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim, Kemendisbudristek berinisiatif mengembangkan program kebijakan kemandirian belajar. Kurikulum Merdeka ditetapkan sebagai kurikulum nasional dengan berpayung hukum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

(Permendisbudristek) Nomor 12 Tahun 2024. Program Kurikulum Merdeka diimplementasikan sebagai perwujudan visi transformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia, dengan tujuan membentuk "Pelajar Pancasila." (Widyastuti, 2022).

Dalam penerapannya, Kurikulum Merdeka tidak diberlakukan secara serentak di semua lembaga pendidikan. Sesuai dengan kebijakan Kemendikbudristek, setiap institusi pendidikan diberikan fleksibilitas dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Beberapa program yang mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) termasuk Program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) (Puan Maharani et al., 2023). Dukungan ini membantu mengidentifikasi lembaga pendidikan yang berminat mengadopsi IKM. Institusi yang tertarik akan menerima pendampingan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri, sehingga guru, kepala sekolah, pengawas, serta pemangku kepentingan dapat berbagi praktik terbaik melalui seminar atau lokakarya yang diselenggarakan secara mandiri (Nugraha, 2022).

Program Kurikulum Merdeka ini telah disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan dan percobaan penerapannya di beberapa sekolah di Indonesia. Hingga saat ini, sudah banyak satuan pendidikan yang mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajarannya. Beberapa sekolah yang menjadi sekolah penggerak dan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yaitu SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. Penerapan dilaksanakan dengan runtut dan bertahap mulai dari penyeleksian, pemahaman teknis hingga pelaksanaan pembelajaran. Adapun hambatan yang dialami saat implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri Randugunting 6 yaitu salah satunya dari aspek kompetensi guru yang kurang dalam pemahaman Kurikulum Merdeka, karakteristik siswa yang pasif menjadi sebuah tantangan bagi sekolah dan guru sampai dalam proses pembelajaran dan asesmen di kelas pun guru mengalami kesulitan dalam pengelolaannya (Marheni et al., 2023). Selain itu, SMP Negeri 1 Karanganyar telah mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun, penerapannya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masa implementasi yang masih relatif baru, sehingga prosesnya masih dalam tahap penyesuaian, dan perubahan

yang terjadi belum begitu signifikan. Kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam antara lain adalah kesulitan para pendidik dalam menyajikan pembelajaran yang menarik dan berkualitas, serta menentukan tema dan konten yang tepat untuk kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), agar sesuai dengan minat dan bakat siswa (Hidayatsyah Noor et al., 2023).

Saat ini, banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang telah mulai menerapkan pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, termasuk untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP). Namun dalam prakteknya, masih terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan pembelajaran PAI-BP berdasar Kurikulum Merdeka. Kekurangan-kekurangan tersebut tercermin dalam kinerja pendidik selama proses pembelajaran (Susilowati, 2022). Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara Kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013, yang menuntut para guru untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang terjadi. Perbedaan-perbedaan tersebut sejalan dengan temuan Mulky Munawar dalam penelitiannya yang berjudul "Studi Konseptual Perubahan Kurikulum PAI 2013 ke Kurikulum Merdeka." Salah satu perbedaan utama adalah Kurikulum Merdeka yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Selain itu, penerapan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi faktor pembeda signifikan antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Dalam konteks PAI, hal ini juga menjadi pembeda antara kurikulum PAI dalam Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Dalam mengimplementasikan kurikulum, para guru termasuk guru PAI harus memperhatikan dan beradaptasi terhadap perbedaan-perbedaan teknis antara Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013. Contohnya, dalam komponen tujuan Kurikulum 2013 mengacu pada KI dan KD yang kemudian berubah pada Kurikulum Merdeka menjadi CP; materi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka lebih sederhana serta memberi keleluasaan kepada guru dalam menyampaikan materinya; strategi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka lebih variatif, inovatif juga kontekstual dibanding Kurikulum 2013, serta; evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka lebih kompleks dari Kurikulum 2013 karena mencakup

asesmen diagnostik dari segi kognitif maupun non-kognitif (Munawar, 2023). Oleh karena itu, penulis memandang bahwa permasalahan ini perlu mendapatkan solusi, salah satunya dengan melakukan analisis mendalam terkait empat standar dalam standar nasional pendidikan, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) fase D dalam Kurikulum Merdeka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah:

1. Bagaimana standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran PAI-BP fase D dalam Kurikulum Merdeka?
2. Bagaimana standar isi pada mata pelajaran PAI-BP fase D dalam Kurikulum Merdeka?
3. Bagaimana standar proses pada mata pelajaran PAI-BP fase D dalam Kurikulum Merdeka?
4. Bagaimana standar penilaian pendidikan pada mata pelajaran PAI-BP fase D dalam Kurikulum Merdeka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran PAI-BP fase D dalam Kurikulum Merdeka.
2. Menganalisis standar isi pada mata pelajaran PAI-BP fase D dalam Kurikulum Merdeka.
3. Menganalisis standar proses pada mata pelajaran PAI-BP fase D dalam Kurikulum Merdeka.
4. Menganalisis standar penilaian pendidikan pada mata pelajaran PAI-BP fase D dalam Kurikulum Merdeka.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan dalam memberikan data deskripsi pembelajaran PAI-BP dalam Kurikulum Merdeka sehingga dapat dijadikan acuan bagi para tenaga pengajar dalam menyampaikan materi PAI-BP secara maksimal dan sesuai.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa, atau sebagai sumber informasi tambahan terkait topik penelitian yang dibahas.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat bagi lembaga**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) dalam Kurikulum Merdeka pada jenjang SMP fase D.

#### **b. Manfaat bagi peneliti**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pembelajaran PAI-BP dalam Kurikulum Merdeka jenjang SMP fase D. Sehingga secara terukur, peneliti dapat mengetahui proses penerapan pembelajaran PAI-BP dalam Kurikulum Merdeka di SMP fase D.

#### **c. Manfaat bagi guru PAI di sekolah**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pembelajaran PAI-BP dalam Kurikulum Merdeka jenjang SMP fase D. Dengan begitu, guru PAI dapat mengembangkan proses pembelajaran PAI-BP dengan lebih efektif melalui hasil penelitian ini.

#### **d. Bagi pembaca secara umum**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pembelajaran PAI-BP dalam Kurikulum Merdeka jenjang SMP fase D.

## E. Kerangka Berpikir

Bagi sebuah bangsa atau negara, pendidikan harus dilaksanakan secara optimal sebagai sarana utama dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berperan krusial dalam mendukung perkembangan kualitas potensi peserta didik (Hasanah, 2018). Tanpa kurikulum yang tepat, mencapai tujuan dan sasaran pendidikan akan sulit dilakukan. Kurikulum tidak hanya berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pengajaran di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum menjadi komponen yang sangat krusial dalam sistem pendidikan (Jamaluddin, 2022).

Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary, implementasi didefinisikan sebagai "*put something into effect*," yang berarti penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak (Mulyasa, 2008). Implementasi adalah proses menerapkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan praktis yang menghasilkan dampak, seperti perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap (Kunandar, 2007). Implementasi tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak adanya keterkaitan dengan objek lain (Susilowati, 2022). Dalam pelaksanaannya kurikulum bersifat dinamis, yaitu terus mengalami perubahan dan pengembangan secara berkelanjutan menyesuaikan kebutuhan manusia pada setiap generasi. Prinsip itu berlaku juga dengan kurikulum pendidikan Indonesia. Perubahan atau rekonstruksi kurikulum di Indonesia sering terjadi seiring dengan pesatnya laju perkembangan sistem pendidikan yang ada. Untuk mengikuti perkembangan sains dan teknologi serta masyarakat, maka kurikulum perlu terus dikembangkan dan disempurnakan. Kurikulum terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman sebagai bagian dari evaluasi yang dilakukan secara dinamis, inovatif, dan berkala. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sarana pembelajaran yang sesuai demi peningkatan kualitas pendidikan (Hidayatsyah Noor et al., 2023). Kurikulum diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga suatu bangsa dapat menghasilkan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, perubahan dan pengembangan kurikulum menjadi hal yang penting karena dianggap dapat menentukan masa depan peserta didik dalam suatu bangsa.

Perubahan dan pengembangan kurikulum memerlukan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun tenaga pendidik, karena hal ini berhubungan langsung dengan arah dan tujuan pendidikan, pengalaman belajar yang diterima oleh peserta didik, serta cara pengorganisasian pengalaman belajar tersebut (Amalia & Asyari, 2023).

Pengembangan kurikulum adalah proses dinamis yang merespons tuntutan perubahan struktural pemerintahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kurikulum adalah sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia (SDM), yang memainkan peran penting dalam keberhasilan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, SDM perlu dibina secara berkelanjutan melalui jalur formal maupun nonformal (Alhamuddin, 2014). Setiap pendidik perlu memahami perubahan dan pengembangan kurikulum karena ini adalah aspek penting dalam formulasi pedagogis dalam konteks pendidikan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum, pendidik dapat dengan tepat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, media pengajaran, serta alat evaluasi pembelajaran (Jamaluddin, 2022). Kurikulum senantiasa berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum haruslah memiliki landasan yang dijadikan sebagai dasar pijakan. Empat landasan tersebut yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis dan historis (Ornstein & Hunkins, 2016). Landasan filosofis berkaitan tentang nilai-nilai ideologis yang berlaku di masyarakat karena proses pendidikan merupakan interaksi antar manusia, terutama antar guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Landasan psikologis berkaitan dengan tahap pengembangan dan kebutuhan peserta didik, dan psikologi belajar yang sesuai dengan teori belajar. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi tentang perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Landasan sosiologis berkaitan dengan masyarakat, kebudayaan, dan pengembangan IPTEK. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat disebut dengan landasan sosiologis karena kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Landasan historis berkaitan dengan sejarah yang

mempengaruhi pengembangan kurikulum. Pengkajian landasan historis memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kurikulum, mencakup dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan memahami landasan historis, pengembang kurikulum dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu serta mempertimbangkan hal-hal futuristik yang perlu diakomodasi dalam pengembangan kurikulum (Suwandi, 2020).

Indonesia telah berulang kali mengalami perubahan dan pengembangan kurikulum. Terhitung sejak kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 dimana kurikulum nasional mulai diterapkan pada tahun 1947 sampai sekarang perubahan yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memulihkan pembelajaran akibat pandemi covid-19 serta untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Munculnya pandemi covid-19 di akhir tahun 2019 menjadi salah satu faktor berubahnya keberlangsungan pendidikan terkhusus di Indonesia. Dampak pandemi yang paling dirasakan dalam dunia pendidikan adalah ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) serta kesenjangan pembelajaran (*learning gap*). Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan menerbitkan kurikulum darurat yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan saat itu. Kurikulum darurat ini pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari Kurikulum Nasional, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam situasi pandemi Covid-19. Tujuannya adalah untuk mencapai keefektifan pembelajaran tanpa menambah tekanan pada guru untuk mengejar target Kurikulum Nasional, sehingga siswa dapat memahami materi dan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam upaya pemulihan pembelajaran, satuan pendidikan diberikan opsi untuk melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tiga opsi kurikulum tersebut adalah Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (yaitu Kurikulum 2013 yang telah disederhanakan oleh Kemdikbudristek), dan Kurikulum Merdeka (Nugraha, 2022). Untuk mengatasi perbedaan dalam ketercapaian kompetensi siswa akibat krisis pembelajaran, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, di

mana Kurikulum Merdeka menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Mewabahnya virus Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan bagi seluruh negara di dunia yang tengah melangsungkan pendidikan bagi para warganya, termasuk Indonesia. Learning loss merupakan dampak terbesar bagi dunia pendidikan akibat dari pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah harus melakukan banyak perubahan, salah satunya melalui kurikulum. Menteri Pendidikan menetapkan kebijakan baru terkait penyederhanaan kurikulum pasca pandemi, Kurikulum Merdeka sebagai bentuk penyederhanaan sekaligus penyempurnaan Kurikulum 2013 (Munawar, 2023).

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang mengedepankan pendekatan berbasis minat dan bakat, memungkinkan peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kurikulum ini mengusung konsep "Merdeka Belajar," yang dirancang untuk membantu pemulihan krisis pembelajaran akibat pandemi Covid-19. Penggunaan teknologi dan kebutuhan kompetensi di era digital saat ini menjadi dasar pengembangan Kurikulum Merdeka. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan berbagai program pendukung seperti Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Program "Merdeka Belajar" merupakan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dasarnya, Kurikulum Merdeka memberikan ruang adanya kolaborasi antar mata pelajaran. PAI-BP pada Kurikulum Merdeka ini diarahkan untuk menyiapkan siswa agar mantap secara spriritual, berakhlak mulia, dan memiliki paham dasar tentang agama Islam dan bagaimana menerapkannya dalam sehari-hari (Panggabean & M, 2024). Melihat begitu pentingnya fungsi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi peserta didik di sekolah, maka penerapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terbaru dengan mengusung konsep

merdeka belajar sangatlah penting, dalam rangka pencapaian tujuan dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang maksimal.

Tujuan dari pembentukan Kurikulum Merdeka adalah untuk memulihkan kondisi pembelajaran yang terpengaruh oleh pandemi dengan menawarkan tiga karakteristik utama:

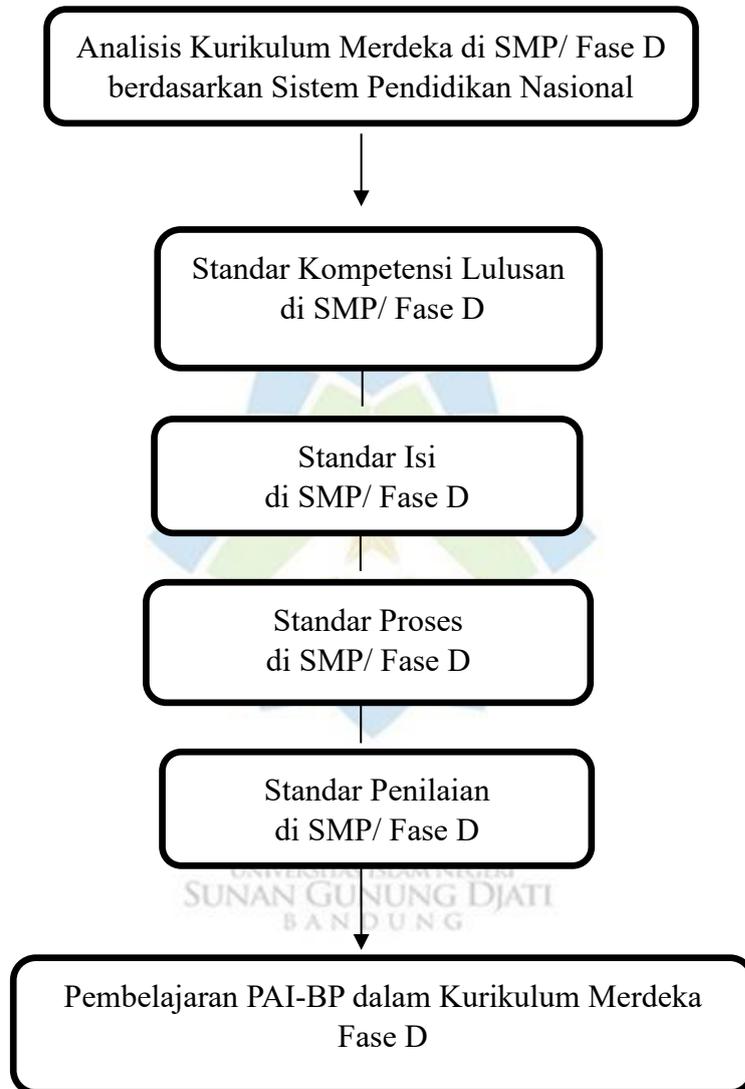
- 1) Pembelajaran Berbasis Proyek: Fokus pada pengembangan soft skill dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- 2) Pembelajaran pada Materi Esensial: Menekankan materi inti yang dianggap penting.
- 3) Struktur Kurikulum yang Fleksibel: Memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pendidikan masing-masing satuan pendidikan (Jojo & Sihotang, 2022).

Karakteristik dari Kurikulum Merdeka inilah yang harus dipelajari juga diteliti agar dalam proses implementasinya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.



Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini sebagai berikut:

*Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berpikir*



## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi peneliti, sebab ini mengacu pada studi sebelumnya yang memiliki signifikansi atau tautan ke penelitian saat ini. Beberapa penelitian lain menunjukkan adanya penjelasan dalam penerapan pembelajaran PAI-BP dalam Kurikulum Merdeka:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Ilham Akbar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Magister Agama Islam pada tahun 2021, dengan judul skripsi "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Merdeka Belajar di SD Anak Saleh Malang." Hasil penelitian ini menunjukkan: a) Perencanaan Pembelajaran PAI-BP: Di SD Anak Saleh Malang, sekolah membentuk tim guru PAI-BP untuk koordinasi dan melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran. Tim guru menyusun kalender pendidikan, Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan kurikulum sekolah serta silabus dari Diknas dan Kemenag-PAIS b) Pelaksanaan Pembelajaran PAI-BP: Dalam praktiknya, guru dan murid melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menekankan pentingnya tujuan materi, kemandirian, dan aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari c) Evaluasi Pembelajaran PAI-BP: Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran untuk menilai efektivitas pembelajaran berbasis Merdeka Belajar di SD Anak Saleh Malang (Akbar, 2021).
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Ihda Alam Aminah dan Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani di Universitas Muhammadiyah Gresik dengan judul "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif yang signifikan. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam berdasarkan kurikulum Merdeka dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan konsep tersebut. Selama proses perencanaan, guru menganalisis dan menyusun kurikulum serta menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Dalam pelaksanaannya, guru Pendidikan Agama Islam

menggunakan metode pengajaran seperti diskusi, tanya jawab, serta media pembelajaran seperti gambar dan video. Dalam penilaiannya, guru menggunakan penilaian terpadu untuk menilai hasil belajar siswa (Aminah & Sya'bani, 2023).

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Iqbal Hidayatsyah Noor, Aulia Izzati, dan Mohammad Zakki Azani di Universitas Muhammadiyah Semarang dan Surakarta dengan judul "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2022/2023." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Karanganyar belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh penerapannya yang baru berjalan selama dua semester, sehingga dalam pelaksanaannya masih dalam tahap penyesuaian dan perubahannya belum terlihat signifikan. Pada proses perencanaan, guru Pendidikan Agama Islam telah melakukan beberapa langkah persiapan, termasuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait Kurikulum Merdeka, serta menyiapkan berbagai perangkat ajar untuk mendukung pembelajaran. Dampak positif dari implementasi Kurikulum Merdeka mencakup meningkatnya kreativitas guru dan siswa, semangat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, serta semangat guru dalam mengembangkan kapasitas diri. Namun, hambatan yang dirasakan meliputi kesulitan pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berkualitas serta dalam menentukan tema dan konten yang tepat pada kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) agar sesuai dengan minat dan bakat siswa.

Adapun dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, hal ini tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Akbar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Magister Agama Islam pada tahun 2021, berjudul "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Merdeka Belajar di SD Anak Saleh Malang"</p>	<p>Persamaan terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Selain itu, sama-sama mengkaji penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang diambil pada penelitian ini yaitu metode studi kasus sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan metode analisis isi. Pada penelitian ini mengambil bahan kajian dari satuan pendidikan tingkat SD sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu di satuan pendidikan tingkat SMP.</p>
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ihda Alam Aminah dan Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani di Universitas Muhammadiyah Gresik dengan judul penelitian "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam".</p>	<p>Persamaan yang terdapat pada jenis penelitian yang digunakan adalah bahwa semuanya adalah penelitian kualitatif, dan bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran</p>	<p>Perbedaannya terletak pada satuan pendidikan yang dijadikan bahan kajian, pada penelitian ini menganalisis penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SD sedangkan yang akan penulis lakukan mengambil bahan kajian dengan menganalisis penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SMP.</p>

		Pendidikan Agama Islam (PAI).	
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Hidayatsyah Noor, Aulia Izzati dan Mohammad Zakki Azani di Universitas Muhammadiyah Semarang dan Surakarta dengan judul penelitian “Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2022/2023”.	Persamaannya ada pada jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu penelitian ini sama- sama bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SMP.	Perbedaan terletak pada metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode studi lapangan dan mengumpulkan data melalui pengamatan/observasi langsung, wawancara, studi dokumen, catatan lapangan, serta berbagai buku dan jurnal pendukung. Sebaliknya, penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan metode analisis isi dan mengumpulkan data dalam bentuk teks atau dokumen dengan pendekatan pengumpulan data secara pasif melalui teknik studi dokumen.